****

**DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK**

**RKP TA 2015 dan Pagu Indikatif TA 2015**

**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**JAKARTA, APRIL 2014**

**LAMPIRAN 1**

**DOKUMEN KESEPAKATAN**

**PERTEMUAN TIGA PIHAK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acara | | : | | Pertemuan tiga pihak pembahasan RKP Tahun Anggaran 2014 dan Pagu Indikatif RAPBN Tahun Anggaran 2015untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA). |
| Tanggal dan Waktu | |  | |  |
| 1. Tanggal | | : | | 26 Maret 2014, 1 April 2014, 3 April 2014, dan 15 April 2014 |
| 1. Waktu | | : | | 09.00 - 16.00 WIB |
| Tempat | | **:** | | Ruang Rapat DJA, Hotel Akmani, Hotel Marcopolo, Ruang Direktur KP3A-Bappenas |
| Pimpinan Rapat | | : | | Dr. Hadiat, MA |
|  | |  | | Plt. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| Dasar Pelaksanaan | | : | | 1. Rancangan awal Tahun RKP 2015 Buku I dan Buku II 2. Surat Bersama Menteri PPN/KepalaBappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0091/M.PPN/ 03/2014dan Nomor S-179/MK.02/2014Tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 Tanggal 19 Maret 2014 |
| Tujuan Pertemuan | |  | | 1. Finalisasi Pagu Indikatif Kementerian PP dan PA; 2. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan didanai pada tahun anggaran 2015, beserta indikator kinerja, *output*, target, dan sasaran kinerja yang jelas dan terukur; dan 3. Menilai dan menetapkan kegiatan prioritas yang belum didanai dalam Pagu Indikatif Kementerian PP dan PA tahun anggaran 2015, untuk diusulkan mendapatkan pendanaannya |
| Peserta Pertemuan : | | | | |
| 1. Kementerian PPN/BAPPENAS | | | | |
| 1. Nama | : | | Dr. Hadiat, MA | |
| Jabatan | : | | Plt. Direktur KP3A Bappenas | |
| 1. Nama | : | | Ir. Destri Handayani, ME | |
| Jabatan | : | | Kasubdit Pemberdayaan Perempuan | |
| 1. Nama | : | | Ir. Yosi Diani Tresna, MPM | |
| Jabatan | : | | Kasubdit Perlindungan Anak | |
| 1. Kementerian Keuangan | | | | |
| 1. Nama | : | | Purwanto, SE, MSc. | |
| Jabatan | : | | Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran | |
| 1. Nama | : | | Ir. Agus Budi Setiawan, MM | |
| Jabatan | : | | Kasubdit Anggaran II-D, Direktorat Anggaran II | |
| 1. Nama | : | | Fajar Apriliyana, SE | |
| Jabatan | : | | Kasi Anggaran II D-1, Direktorat Anggaran II | |
| 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | |
| 1. Nama | : | | Ir. Agustina Erni Susiyanti, M.Sc | |
| Jabatan | : | | Kepala Biro Perencanaan | |
| 1. Nama | : | | Fakih Usman, ME | |
| Jabatan | : | | Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran | |

**HASIL KESEPAKATAN**

**Kementerian/Lembaga : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. **SASARAN STRATEGIS**

Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan meliputi:

* 1. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi;
  2. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di Bidang Polsoskum;
  3. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan;
  4. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak anak
  5. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak;
  6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. **ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kementerian PP dan PA pada Tahun 2014 maka arah kebijakan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak difokuskan pada:

1. Menyusun berbagai kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak termasuk kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dari Pemerintah Daerah;
2. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender dan peduli anak pada program Kementerian/Lembaga dan pemerintah Daerah;
3. Membangun jejaring kelembagaan dan narasumber pada tingkat daerah, nasional, dan internasional untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG dan mendorong pemenuhan hak anak;
4. Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program, anggaran, dan kegiatan yang responsif gender dan peduli anak di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Menyusun manajemen yang akuntabel dan terintegrasi.
6. **CATATAN PEMBAHASAN**

| **No.** | **Materi Pembahasan** | **Catatan Kementerian PPN/Bappenas** | **Catatan Kementerian Keuangan** | **Catatan Kementerian/Lembaga** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **Prioritas Pembangunan Nasional** | | | | |
| 1 | Program dan Kegiatan Prioritas | * Perubahan pagu antarprogram untuk membiayai belanja operasional akan dilakukan jika kebutuhan belanja operasionalyg diusulkan bersifat mendesak serta sudah di-*review* dan disetujui oleh DJA, Kemkeu. * Alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan koordinatif yang bersifat substansi program KGPP dan PA disarankan tetap berada dibawah program teknis dan pelaksanaannya tetap dikoordinasikan oleh Sesmen. * Setuju dengan usulan untuk me-*review* sasaran, indikator, dan target kegiatan prioritas.   *Berarti tambahan program DM bukan Rp13.968,0 tetapi Rp15.903,4M ???* | * Alokasi anggaran pada pagu indikatif TA 2015 diutamakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan prioritas | * Diusulkan pergeseran pagu antarprogram sebagai berikut:   + - * Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya:         1. Bertambah sebesar Rp13.968,0 juta untuk tambahan belanja barang operasional sebesar Rp7.500,0 juta dan kegiatan-kegiatan koordinatif sebesar Rp 6.468,0 juta;         2. Alokasi kegiatan KPAI bertambah sebesar Rp 1.935,4 juta dari Rp 10.064,6 juta menjadi Rp 12.000,0juta. Penambahan ini digunakan untuk sosialisasi UU SPPA. Kegiatan KPAI ini dipindahkan ke Program PA;         3. Pagu Program DM dari Rp 89.505,6 juta menjadi Rp93.409,0 juta;       * Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP)berkurang sebesar Rp10.762,0juta (untuk program DM) dari Rp77.070,4 juta menjadi Rp66.308,4 juta.       * Program Perlindungan Anak (PA):         1. Alokasi berkurang sebesar Rp5.141,4 juta (untuk program DM)dari Rp50.250,0 juta menjadi Rp45.108,6 juta.         2. Terdapat perpindahan Kegiatan KPAI dari Program DM ke program PA sebesar Rp 12.000,0 juta         3. Usulan pagu Program PA dari Rp Rp50.250,0 juta menjadi Rp **57.108,6** juta * Dilakukan Perubahan terkait sasaran, indikator, dan target pada kegiatan prioritas. |
| 2 | Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke DAK | * Setuju dekon dilanjutkan untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak di daerah. Hal ini juga untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan Menteri PP dan PA dengan Wamen Bappenas, dimana diperlukan upaya meningkatkan kapasitas daerah dalam implementasi PUG serta pemenuhan hak dan perlindungan anak. | * Setuju, dekon masih diperlukan untuk meningkatkan komitmen dan mekanisme koordinasi pelaksanaan KGPP dan PA dan bisa dilaksanakan di tahun 2015. | * Dialokasikan dana dekon untuk program KGPP sebesar Rp 10.000 juta dan program PA sebesar Rp10.000 juta untuk kegiatan *capacity building* SDM daerah terkait KGPP dan PA. |
| **Pendanaan Pembangunan Nasional** | | | | |
| 3 | Pinjaman dan Hibah Luar Negeri | Setuju pencatatan ke dalam DIPA dilaksanakan setelah direalisasikan oleh UNFPA dan UNICEF. | Revisi anggaran untuk menampung dana hibah dilaksanakan setelah direalisasikan oleh UNFPA dan UNICEF. | * Direncanakan akan ada hibah langsung dari UNFPA dan UNICEF, namun jumlahnya belum diketahui. * Pencatatan kedalam DIPA akan dilaksanakan setelah direalisasikan oleh UNFPA dan UNICEF. |
| 4 | Surat Berharga Syariah Negara | -- | - | - |
| 5 | PNBP/BLU | -- | - | - |
| 6 | Belanja Operasional | * Setuju dengan usulan KPPPA |  | * KPP dan PA menyampaikan bahwa terdapat kekurangan belanja barang operasional dan mengusulkan tambahan sebesar Rp7.500,0 juta. |
| 7 | Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni | Terkait usulan *new initiative*, KPPPA perlu mengusulkan secara resmi kepada Bappenas dan Kemkeu sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selanjutnya akan dilakukan *review* terhadap usulan tersebut. | * Alokasi anggaran pada pagu indikatif TA 2015 diutamakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan prioritas. * Pembahasan dan penetapan new inisiatif baru berpedoman pada peraturan Menteri PPN 01/2011 tentang Tata Cara Penyusunan Insiatif Baru. | Diusulkan *new initiative*untuk:   * Dukungan *capacity building* untuk 18 PSW (@ Rp.200 juta) sebagai pendamping provinsi penerima dana dekonsentrasi ttg PP sebesar Rp.3.600 juta. * Dukungan *capacity building* untuk8 Perguruan Tinggi(@ Rp.200 juta) sebagai pendamping provinsi penerima dana dekonsentrasi ttg PA sebesar Rp1.600 juta * Pelaksanaan tugas KPPPA sebagai ketua harian sesuai mandat Perpres 18/2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial sebesar Rp. 500 juta * Penyusunan pedoman pelaksanaan anggaran yang responsif anak (PPRA) sebesar Rp. 750 juta |
| **Program Tematik** | | | | |
| 8 | Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) | -- | - | - |
| 9 | Anggaran Pendidikan (AP) | -- | - | - |
| 10 | Anggaran Responsif Gender (ARG) | Sesuai yang tercantum dalam tabel lampiran. | Perlu memerhatikan target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dan tugas fungsi KPPPA | Diusulkan sesuai yang tercantum dalam tabel lampiran |
| 11 | Kerjasama selatan-selatan dan Triangular (KSST) | Sesuai yang tercantum dalam tabel lampiran. |  | Diusulkan sesuai yang tercantum dalam tabel lampiran |
| 12 | Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) | -- | - | - |
| 13 | Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) | -- | - | - |
| 14 | Millenium Development Goals (MDGs) | -- | - | - |
| 15 | Mitigasi Perubahan Iklim (MPI) | -- | - | - |

**Jakarta, April 2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kepala Biro Perencanaan  ( Ir. Agustina Erni Susiyanti, M. Sc. )  NIP. 19620824 198702 2 001 | Kementerian Keuangan  Direktur Anggaran II  ( Purwanto, SE, MSc. )  NIP. 19690421 199501 1 001  **Mengetahui,** | Kementerian PPN/Bappenas  Plt. Direktur Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (DR. Hadiat, MA)  NIP. 19601101 198811 1 001 |

|  |  |
| --- | --- |
| Kementerian PPN/Bappenas  Deputi Bidang Sumber Daya Manusia  dan Kebudayaan  ( Dra. Nina Sardjunani, MA )  NIP. 19570925 198511 2001 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak  Sekretaris Menteri  (Dra. Sri Danti, MA)  NIP. 19591115 198803 2001 |

**LAMPIRAN 2**

**LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN**

* + 1. **RIEKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN PER PROGRAM**

***(dalam ribu)***

| **Kode** | | **Program/ Kegiatan** | **Sumber Pendanaan** | **Rencana 2015** | **Prakiraan maju** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dep** | **Prog** | **2016** | **2017** | **2018** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 047 | 01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP dan PA | a. Rupiah Murni | 91.473,60 | 100.932,00 | 108.051,84 | 114.870,06 |
| b. PNBP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| c. BLU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| d. PLN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| e. HLN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| f. PDN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| g. SBSN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Total** | **91.473,60** | **100.932,00** | **108.051,84** | **114.870,06** |
| 047 | 06 | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | a. Rupiah Murni | 67.466,6 | 80.638,5 | 90.003,9 | 101.767,8 |
| b. PNBP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| c. BLU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| d. PLN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| e. HLN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| f. PDN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| g. SBSN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Total** | **67.466,6** | **80.638,5** | **90.003,9** | **101.767,8** |
| 047 | 07 | Program Perlindungan Anak | a. Rupiah Murni | 57.885,80 | 80.599,51 | 86.758,62 | 96.461,37 |
| b. PNBP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| c. BLU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| d. PLN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| e. HLN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| f. PDN | 0,0 | 0,0 | B0,0 | 0,0 |
| g. SBSN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Total** | **57.885,80** | **80.599,51** | **86.758,62** | **96.461,37** |
|  | | | **a. Rupiah Murni** | 216.826,00 | 262.170,03 | 286.844,36 | 313.099,28 |
| **b. PNBP** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **c. BLU** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **d. PLN** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **e. HLN** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **f. PDN** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **g. SBSN** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Total** | **216.826,00** | **262.170,03** | **286.844,36** | **313.099,28** |

* + 1. **REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN PER KEGIATAN**

| **KODE** | **PROGRAM/**  **KEGIATAN** | **INDIKATOR** | | **TARGET** | | | | | | | **INDIKASI PENDANAAN (dalam Juta)** | | | | **PRIORI­TAS** | **TEMATIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA 2015** | | | | **PERKIRAAN MAJU** | | | **RENCANA 2015** | **PERKIRAAN MAJU** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **1** | **2** |  | | **4** | | | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **047.01.01** | **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya** | 1. Persentase (%) rencana program dan anggaran KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis | | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | **91.474,60** | **112.612** | **121.322** | **130.120** |  |  |
| 1. Persentase (%) layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel | | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 |
| 1. Persentase (%) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum | | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 |
| **2783** | **Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat** |  | |  | |  | |  |  |  | **11.000,00** | **13.000,00** | **14.500,00** | **15.500,00** |  |  |
| 1. Persentase (%) peraturan perundang-undangan lainnya dan produk hukum di internal KPP dan PA yang sesuai dengan rencana kerja tahunan | | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 3.875,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | K/L |  |
| 1. Persentase (%) Berita terkait KPP dan PA yang didistribusikan dan direspon pada periode waktu yang telah ditentukan | | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 5.750,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | K/L |  |
| 1. Presntase (%) dokumen Pengaduan kekerasan Perempuan dan Anak yang diselesaikan tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan | | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 1.375,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | K/L |  |
| **2784** | **Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program dan Anggaran** |  | |  | |  | |  |  |  | **8.000,00** | **9.032,00** | **10.052,00** | **11.270,00** |  |  |
| 1. Persentase (%) dokumen rencana Program, Kegiatan dan anggaran yg disusun dan diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana kerja tahunan | | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 1.900 | 2.200 | 2.400 | 2.700 | B |  |
| 1. Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah disusun | | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 2.000 | 2.240 | 2.509 | 2.810 | B |  |
| 1. Persentase (%)Dokumen penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja dan RB yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan road map reformasi briokrasi Kemen PPPA | | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 1.850 | 2.072 | 2.321 | 2.599 | B |  |
| 1. Persentase (%) Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran yang disusun dan ditindaklanjuti | | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 2.250 | 2.520 | 2.822 | 3.161 | B |  |
| **2785** | **Pengembang­an SDM, administrasi, dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kementerian PP dan PA** |  | |  | |  | |  |  |  | **65.723,60** | **71.900,00** | **76.200,00** | **80.500,00** |  |  |
| 1. Presntase (%) Laporan pengelolaan administrasi dan pengembangan SDM sesuai dengan aturan yang ada | | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 4.500,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | K/L |  |
| 1. Presntase (%) laporan keuangan yg disusun sesuai dengan aturan yang ada | | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 36.450,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | K/L |  |
| 1. Jumlah bulan layanan perkantoran yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku | | 12 | | bln | | 12 | 12 | 12 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | K/L |  |
| 1. Jumlah bulan layanan TU pimpinan yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku | | 12 | | bln | | 12 | 12 | 12 | 2.773,60 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | K/L |  |
| **2786** | **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KPP dan PA** |  | |  | |  | |  |  |  | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |  |  |
| Persentase (%) Laporan Hasil pengawasan Internal/Eksternal yang ditindaklanjuti dan diterbitkan tepat waktu dan berkualitas | | 100 | | % | | 100% | 100% | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | K/L |  |
| **2788** | **Telaahan PP dan PA** |  | |  | |  | |  |  |  | **4.750,00** | **5.000,00** | **5.300,00** | **5.600,00** |  |  |
| Persentase (%) Kajian program PP dan PA bidang penanggulangan kemiskinan, pengembangan sistem informasi manajemen, hubungan internasional, komunikasi pembangunan dan agama yg di manfaatkan | | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 4.750,00 | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | K/L |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **047.01.06** | **Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (target?)(anggaran 2016-2018 tidak sesuai dengan hal 9)** | 1. **Jumlah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pelaksanaan PUG di Bidang Ekonomi di Tingkat Nasional dan Daerah** | |  | |  | |  |  |  | **67.466.60** | **84.341,02** | **97.493,23** | **109.978,0** |  |  |
| **Jumlah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pelaksanaan PUG Di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum di Tingkat Nasional dan Daerah** | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan** | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **2789** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penyusunan Data Gender** |  | |  | |  | |  |  |  | **3.450,00** | **4.550,00** | **4.350,00** | **4.950,00** |  |  |
| 1. Persentase pengguna yang memanfaatkan sistem manajemen informasi pimpinan   ( N = 181, es 1 s/d 4) (ada target, ga ada anggaran) | | 10 | | % | | 30 | 60 | 90 | 500,00 | 600,00 | - | - | N | ARG |
| 1. Persentase perangkat sistem aplikasi dan jaringan yang berfungsi dengan baik (N= 1 Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi) | | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 450,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | N | ARG |
| 1. Persentase unit pengelola data yang membangun sistem data terpilah,statistik gender dan anak (N=45 K/L) | | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 360,00 | 400,00 | 400,00 | 600,00 | N | ARG |
|  |  | 1. Persentase unit pelaksana yang memanfaatkan data terpilah, statistik gender dan anak (N = 25 unit Pengelolan) | | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 600,00 | N | ARG |
|  |  | 1. Jumlah Modul yang digunakan untuk pelatihan SDM pengelola data di K/L dan Pemda tentang data terpilah, statistik gender dan anak | | 2 | | Modul | | 2 | - | - | 380,00 | 250,00 | - | - | N | ARG |
|  |  | 1. Persentase fasilitator sistem data terpilah, statistik gender dan anak yang terlatih (N = 100 Orang) | | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 373,00 | 450,00 | 450,00 | 900,00 | N | ARG |
|  |  | 1. Jumlah Publikasi Profil gender, perempuan, anak | | 4 | | Pblk | | 4 | 4 | 4 | 817,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | N | ARG |
|  |  | 1. Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan penyajian informasi gender dan anak yang disusun dan ditindaklanjuti | | 6 | | Lap | | 8 | 8 | 6 | 270,00 | 600,00 | 600,00 | 350,00 | N | ARG |
| **2790** | **Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang hukum yang responsif gender** |  | |  | |  | |  |  |  | **3.150,00** | **3.205,32** | **3.678,85** | **4.043,44** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Hukum yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan | | 1 | | Kebij | | 1 | 1 | 1 | 378,50 | 330,00 | 363,00 | 399,30 | N | ARG |
| 1. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Hukum yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (N= 5 peraturan) 🡪 yg diukur peraturan atau K/L | | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,30 | N | ARG |
|  |  | 1. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Hukum | | 1 | | Model | | 1 | 1 | 1 | 443,00 | 440,00 | 484,00 | 532,40 | N | ARG |
|  |  | 1. Persentase K/L bidang Hukum Dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (N K/L = 10 dan N Prov = 10) |  |  | |  | |  |  |  | 600,00 | 660,00 | 726,00 | 798,60 | N | ARG |
| K/L | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,20 |
| Prov | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 400,00 | 440,00 | 484,00 | 532,40 |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Hukum yg distandarisasi (N Lembaga = 8 dan SDM=60 ) |  |  | |  | |  |  |  | - | 150,00 | 315,00 | 346,50 | N | ARG |
| Lemb | - | | % | | 25 | 50 | 75 | - | 150,00 | 165,00 | 181,50 |
| SDM | - | | % | | - | 33.33 | 66.66 | - | - | 150,00 | 165,00 |
|  |  | 1. Persentase K/L Bidang Hukum & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (N K/L = 10 dan N Prov = 3) |  |  | |  | |  |  |  | 650,00 | 715,00 | 786,50 | 865,15 | N | ARG |
| K/L | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 250,00 | 275,00 | 302,50 | 332,75 |
| Prov | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 400,00 | 440,00 | 484,00 | 532,40 |
|  |  | 1. Persentase data terpilah di K/L bidang Hukum dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (N K/L = 10 dan N Prov = 3) |  |  | |  | |  |  |  | 455,00 | 497,82 | 547,60 | 602,36 | N | ARG |
| K/L | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 155,00 | 167,82 | 184,60 | 203,06 |
| Prov | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,30 |
|  |  | 1. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Hukum Dan Pemda yg ditindaklanjuti (N K/L = 10 dan N Prov = 3) |  |  | |  | |  |  |  | 75,00 | 82.50 | 90,75 | 99,83 | N | ARG |
| K/L | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 248,50 | 273,35 | 300,69 | 330,75 |
| Prov | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 |  |  |  |  |
| **2791** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Bidang Infrastrukur yang Reponsif Gender** |  | |  | |  | |  |  |  | 3.690,00 | 3.961,10 | 4.357,21 | 4.792,93 |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Infrastruktur yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan | | 1 | | Kebj | | 2 | 2 | 1 | 425,00 | 925,58 | 1.018,14 | 559,98 | N | ARG |
| 1. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (N= 4 peraturan) 🡪 yg diukur peraturan atau K/L | | 25 | | % | | 50 | 75 | 100 | 568,00 | 605,00 | 665,50 | 732,05 | N | ARG |
| 1. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Infrastruktur | | 2 | | Model | | 2 | 2 | 2 | 508,00 | 526,10 | 956,54 | 1.052,19 | N | ARG |
|  |  | 1. Persentase K/L bidang Infrastruktur dan pemda yg mengembangkan model pelaksanaan kebijakan PP dan PUG (N K/L= 6, N Pemda=10) |  |  | |  | |  |  |  | 600,00 | 660,00 | 720,00 | 792,00 | N | ARG |
| K/L | 16,67 | | % | | 16,67 | 50 | 83,33 | 300,00 | 330,00 | 360,00 | 396,00 |
| Prov | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 300,00 | 330,00 | 360,00 | 396,00 |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Infrastruktur yg distandarisasi (N lembaga = 6 dan SDM =125) |  |  | |  | |  |  |  | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 | N | ARG |
| Lemb | 16,67 | | % | | 16,67 | 50 | 83,33 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 132,00 |
| SDM | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 132,00 |
|  |  | 1. Persentase K/L bidang Infrastruktur & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (N K/L= 6, N Pemda=4 ) |  |  | |  | |  |  |  | 450,00 | 495,00 | 540,00 | 594,00 | N | ARG |
| K/L | 16,67 | | % | | 16,67 | 50 | 83,33 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
| Prov | 25 | | % | | 50 | 75 | 100 | 250,00 | 275,00 | 300,00 | 330,00 |
|  |  | 1. Persentase data terpilah di K/L bidang Infrastruktur dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(N K/L= 6, N Pemda=10) |  |  | |  | |  |  |  | 539,00 | 495,00 | 540,00 | 594,00 | N | ARG |
| K/L | 16,67 | | % | | 16,67 | 50 | 83,33 | 289,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
| Prov | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 250,00 | 275,00 | 300,00 | 330,00 |
|  |  | 1. Persentase laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang infrastruktur dan Pemda yg ditindaklanjuti (Nnya?) |  |  | |  | |  |  |  | 400,00 | 440,00 | 480,00 | 528,00 | N | ARG |
| K/L | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
| Prov | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
| **2792** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi yang Reponsif Gender** |  | |  | |  | |  |  |  | **3.150,00** | **3.318,90** | **3.650,79** | **4.015,87** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Iptek dan sumber daya ekonomi yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan | | 1 | | Kebj | | 2 | 2 | 1 | 425,00 | 925,58 | 1.018,14 | 559,98 | N | ARG |
| 1. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang iptek dan sumber daya Ekonomi yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (N = 3 peraturan ) 🡪 yg diukur peraturan atau K/L | | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 375,00 | 385,00 | 423,50 | 465,85 | N | ARG |
| 1. Jumlah model pelaksanaan kebijakan PP dan PUG bidang iptek dan sumber daya ekonomi | | 2 | | Model | | 2 | 2 | 2 | 420,00 | 436,11 | 792,92 | 872,21 | N | ARG |
|  |  | 1. Persentase K/L bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi dan pemda yg mengembangkan model pelaksanaan kebijakan PP dan PUG (N K/L= 3, N Pemda=10) |  |  | |  | |  |  |  | 630,00 | 601,00 | 660,00 | 726,00 | N |  |
| K/L | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 380,00 | 330,00 | 360,00 | 396,00 |
| Prov | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 250,00 | 275,00 | 300,00 | 330,00 |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi yg distandarisasi   (N = 3 lembaga dan SDM= 125) (Tidak ada target, tapi ada anggaran) |  |  | |  | |  |  |  | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 | N |  |
| Lemb | 33,33 | | % | | 66,66 | 100 | ? | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 132,00 |
| SDM | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 132,00 |
|  |  | 1. Persentase K/L bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (N K/L= 3, N Pemda=3) |  |  | |  | |  |  |  | 400,00 | 440,00 | 480,00 | 528,00 | N |  |
| K/L | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
| Prov | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
|  |  | 1. Persentase data terpilah di K/L bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (N K/L= 3, N Pemda=10) |  |  | |  | |  |  |  | 400,00 | 440,00 | 480,00 | 528,00 | N |  |
| K/L | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
| Prov | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
|  |  | 1. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidangIptek dan Sumber daya Ekonomi Dan Pemda yg ditindaklanjuti (Nnya?) |  |  | |  | |  |  |  | 300,00 | 330,00 | 360,00 | 396,00 | N |  |
| K/L | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 150,00 | 165,00 | 180,00 | 198,00 |
| Prov | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 150,00 | 165,00 | 180,00 | 198,00 |
| **2793** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan** |  | |  | |  | |  |  |  | **4.445,00** | **5.665,00** | **6.120,00** | **5.600,00** |  |  |
| 1. Jumlah Kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan | | 1 | | Kebij | | 1 | 1 | - | 450,00 | 790,00 | 870,00 | - | N | ARG |
| 1. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait. (N:K/L = 6 N:prov = 10) (Nnya peraturan atau K/L dan prov?) | | 20 | | % | | 40 | 60 | 8 | 800,00 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | N | ARG |
|  |  | 1. Jumlah model pelaksanaan kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. | | 1 | | model | | 1 | 1 | 1 | 458,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | N | ARG |
|  |  | 1. Persentase K/L dan Pemda yang mengembangkan model pelaksanaan kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan (N:K/L = 6 N:Prov = 10) |  |  | |  | |  |  |  | 1.236,37 | 1.150,00 | 1.250,00 | 1.350,00 | N |  |
| K/L | 16,67 | | % | | 33,33 | 50 | 83,33 | 486,37 | 400,00 | 450,00 | 500,00 |
| Prov | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 750,00 | 750,00 | 800,00 | 850,00 |
|  |  | 1. Persentase Lembaga dan SDM Penyedia Layanan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang distandarisasi (N:Lembaga = 19 N:SDM = 100) |  |  | |  | |  |  |  | 400,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | N |  |
| Lemb | - | | % | | 47,37 | 68,42 | 78,95 |  | 250,00 | 300,00 | 350,00 |  |  |
| SDM | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 400,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 |  |  |
|  |  | 1. Persentase data kekerasan di K/L dan Pemda bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dianalisis dan dimanfaatkan. (N:K/L = 6 N:prov = 10) |  |  | |  | |  |  |  | 751,63 | 850,00 | 900,00 | 950,00 | N | ARG |
| K/L | 16,67 | | % | | 33,33 | 50 | 83,33 | 250,63 | 300,00 | 300,00 | 350,00 |  |  |
| Prov | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |
|  |  | 1. Persentase laporan monev pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti (N:K/L = 6 N:prov = 10) |  |  | |  | |  |  |  | 500,00 | 575,00 | 650,00 | 650,00 | N |  |
| K/L | 20 | | % | | 20 | 20 | 20 | 200,00 | 225,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |
| Prov | 20 | | % | | 20 | 20 | 20 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
| **2794** | **Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Kesehatan yang responsif gender** |  | |  | |  | |  |  |  | **3.300,00** | **3.657,41** | **3.499,72** | **3.849,69** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Kesehatan yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan | | 2 | | Kebij | | 1 | - | - | 655,00 | 612,21 | - | - | N | MDG's |
| 1. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Kesehatan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait ( N = 5 peraturan) 🡪 yg diukur peraturan atau K/L | | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 250,00 | 275,00 | 302,50 | 332,75 | N | MDG's |
| 1. Jumlah model pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Kesehatan | | 1 | | Model | | 1 | 1 | 1 | 570,00 | 612,70 | 673,97 | 741,37 | N | MDG's |
|  |  | 1. Persentase K/L bidang Kesehatan Dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (N K/L = 5 dan N Prov = 10) |  |  | |  | |  |  |  | 800,00 | 880,00 | 968,00 | 1.064,80 | N |  |
| K/L | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,30 |  |  |
| Prov | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 665,50 |  |  |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Kesehatan yg distandarisasi   (N lembaga = 8 dan SDM= 60) |  |  | |  | |  |  |  | - | 150,00 | 315,00 | 346,50 | N |  |
| Lemb | - | | % | | 25 | 50 | 75 | - | 150,00 | 165,00 | 181,50 |  |  |
| SDM | - | | % | | - | 33.33 | 66.66 | - | - | 150,00 | 165,00 |  |  |
|  |  | 1. Persentase K/L Bidang Kesehatan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (N K/L = 5 dan N Prov = 4) |  |  | |  | |  |  |  | 425,00 | 467,50 | 514,25 | 565,68 | N |  |
| K/L | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 150,00 | 165,00 | 181,50 | 199,65 |  |  |
| Prov | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 275,00 | 302,50 | 332,75 | 366,03 |  |  |
|  |  | 1. Persentase data terpilah di K/L bidang Kesehatan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (N K/L = 5 dan N Prov = 4) |  |  | |  | |  |  |  | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,30 | N |  |
| K/L | 20 | | % | | 40 | 65 | 80 | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,10 |  |  |
| Prov | 25 | | % | | 25 | 50 | 75 | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,20 |  |  |
|  |  | 1. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Kesehatan Dan Pemda yg ditindaklanjuti (N K/L = 5 dan N Prov = 4) |  |  | |  | |  |  |  | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,30 | N |  |
| K/L | 20 | | % | | 40 | 65 | 80 | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,10 |  |  |
| Prov | 25 | | % | | 25 | 50 | 75 | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,20 |  |  |
| **2795** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan yang Reponsif Gender** |  | |  | |  | |  |  |  | **4.300,00** | **5.048,89** | **5.122,20** | **6.174,99** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Ketenagakerjaan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan | | 1 | | Kebj | | 2 | 2 | 1 | 425,00 | 925,58 | 1.018,14 | 559,98 | N | ARG |
| 1. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Ketenagakerjaan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (N=3 peraturan) 🡪 yg diukur peraturan atau K/L | | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 500,00 | 495,00 | 544,50 | 598,95 | N | ARG |
| 1. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Ketenagakerjaan | | 2 | | Model | | 2 | 2 | 2 | 750,00 | 827,47 | 1.504,59 | 1.654,94 | N | ARG |
|  |  | 1. Persentase K/L bidang Ketenagakerjaan Dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (N K/L= 3, N Pemda=3) |  |  | |  | |  |  |  | 700,00 | 770,00 | 840,00 | 924,00 | N |  |
| K/L | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 350,00 | 385,00 | 420,00 | 462,00 |
| Prov | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 350,00 | 385,00 | 420,00 | 462,00 |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Ketenagakerjaan yg distandarisasi (N = 3 lembaga dan SDM=125) |  |  | |  | |  |  |  | 550,00 | 605,00 | 660,00 | 726,00 | N |  |
| Lemb | 33,33 | | % | | 66,66 | 100 | ? | 300,00 | 330,00 | 360,00 | 396,00 |
| SDM | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 250,00 | 275,00 | 300,00 | 330,00 |
|  |  | 1. Persentase K/L Bidang Ketenagakerjaan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (N K/L= 3, N Pemda=3) |  |  | |  | |  |  |  | 400,00 | 440,00 | 480,00 | 528,00 | N |  |
| K/L | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
| Prov | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
|  |  | 1. Persentase data terpilah di K/L bidangKetenagakerjaan dan Pemda dianalisis dan dimanfaatkan (N K/L= 3, N Pemda=10) |  |  | |  | |  |  |  | 400,00 | 440,00 | 480,00 | 528,00 | N |  |
| K/L | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
| Prov | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
|  |  | 1. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidangKetenagakerjaan dan Pemda yg ditindaklanjuti (Nnya?) |  |  | |  | |  |  |  | 575,00 | 545,94 | 595,57 | 655,12 | N |  |
| K/L | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
| Prov | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 375,00 | 325,94 | 355,57 | 391,12 |
| **2796** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang Reponsif Gender** |  | |  | |  | |  |  |  | **4.905,00** | **5.731,40** | **6.275,35** | **6.342,90** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan | | 1 | | Kebj | | 2 | 2 | 1 | 485,00 | 925,58 | 1.018,14 | 559,98 | N | ARG |
| 1. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (N = 4 peraturan) 🡪 yg diukur peraturan atau K/L | | 25 | | % | | 50 | 75 | 100 | 460,00 | 495,00 | 544,50 | 598,95 | N | ARG |
|  |  | 1. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan | | 2 | | Model | | 2 | 2 | 2 | 950,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | N | ARG |
|  |  | 1. Persentase K/L bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (N K/L= 4, N Pemda=10) |  |  | |  | |  |  |  | 950,00 | 935,00 | 1.020,00 | 1.022,00 | N |  |
| K/L | 25 | | % | | 50 | 75 | 100 | 400,00 | 440,00 | 480,00 | 528 ,00 |
| Prov | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 450,00 | 495,00 | 540,00 | 594,00 |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg distandarisasi (N Lembaga = 4 dan SDM=125) |  |  | |  | |  |  |  | 650,00 | 715,00 | 780,00 | 858,00 | N |  |
| Lemb | 25 | | % | | 50 | 75 | 100 | 350,00 | 385,00 | 420,00 | 462,00 |
| SDM | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 300,00 | 330,00 | 360,00 | 396,00 |
|  |  | 1. Persentase K/L Bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda yang memiliki sistem data terpilah (N K/L= 4, N Pemda=3 |  |  | |  | |  |  |  | 450,00 | 495,00 | 540,00 | 594,00 | N |  |
| K/L | 25 | | % | | 50 | 75 | 100 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
| Prov | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 250,00 | 275,00 | 300,00 | 330,00 |
|  |  | 1. Persentase data terpilah di K/L bidangKUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(N K/L= 4, N Pemda=10) |  |  | |  | |  |  |  | 450,00 | 495,00 | 540,00 | 594,00 | N |  |
| K/L | 25 | | % | | 50 | 75 | 100 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
| Prov | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 250,00 | 275,00 | 300,00 | 330,00 |
|  |  | 1. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidangKUKM dan Industri dan Perdagangan Dan Pemda yg ditindaklanjuti (Nnya?) |  |  | |  | |  |  |  | 610,00 | 600,81 | 622,70 | 684,97 | N |  |
| K/L | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |  |  |
| Prov | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 410,00 | 380,81 | 382,70 | 420,97 |  |  |
| **2797** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Masalah Sosial Perempuan** |  | |  | |  | |  |  |  | **3.890,00** | **4.275,00** | **4.425,00** | **4.125,00** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan PP di bidang Penanganan masalah Sosial Perempuan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan | | 2 | | Kebjj | | 2 | 1 |  | 561,00 | 350,00 | 600,00 |  | B |  |
| 1. Jumlah peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait | | 4 | | kebij | | 4 | 4 | 4 | 1.045,00 | 1.350,00 | 1.550,00 | 1.500,00 | B |  |
|  |  | 1. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan | | 4 | | Model | | 4 | 4 | 3 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | B |  |
|  |  | 1. Persentase K/L terkait bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan Dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP (N: K/L = 4 N: Prov = 6) |  |  | |  | |  |  |  | 1.064,00 | 1.275,00 | 1.175,00 | 1.225,00 | B |  |
| K/L | 25 | | % | | 50 | 75 | 100 | 1.064,00 | 1.275,00 | 1.175,00 | 1.225,00 |
| Prov | 16,67 | | % | | 50 | 83,33 | 100 |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yg distandarisasi (N: Lemb = 5 dan SDM = 10) (tidak ada target, tapi ada anggaran) |  |  | |  | |  |  |  | 350,00 | 400,00 | 350,00 | 450,00 | B |  |
| Lemb | - | | % | | 20 | 40 | 60 | 350,00 | 400,00 | 350,00 | 450,00 |
| SDM | - | | % | | 20 | 40 | 60 |
|  |  | 1. Persentase data terpilah di K/L Terkait bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (N:K/L = 4 N:prov =4) |  |  | |  | |  |  |  | 420,00 | 500,00 | 350,00 | 400,00 | B |  |
| K/L | 25 | | % | | 50 | 75 | 100 | 420,00 | 500,00 | 350,00 | 400,00 |
| Prov | 25 | | % | | 50 | 75 | 100 |
|  |  | 1. Persentase Laporan monev pelaksanaan PP di K/L bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan Dan Pemda yg ditindaklanjuti (N:K/L = 4 N:prov = 4) |  |  | |  | |  |  |  | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 250,00 | B |  |
| K/L | 25 | | % | | 50 | 75 | 100 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 250,00 |
| Prov | 25 | | % | | 50 | 75 | 100 |
| **2798** | **Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Pendidikan yang responsif gender** |  | |  | |  | |  |  |  | **3.240,00** | **3.414,55** | **3.756,01** | **4.131,61** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pendidikan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan | | 2 | | Kebij | | 2 | 2 | 2 | 400,00 | 440,00 | 484,00 | 532,40 | N | ARG |
| 1. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (N = 5 peraturan) 🡪 yg diukur peraturan atau K/L | | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 220,00 | 220,00 | 242,00 | 266,20 | N | ARG |
|  |  | 1. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Pendidikan | | 1 | | Model | | 1 | 1 | 1 | 320,00 | 330,00 | 363,00 | 399,30 | N | MDG's |
|  |  | 1. Persentase K/L bidang Pendidikan Dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG(N K/L = 3 dan N Prov = 10) |  |  | |  | |  |  |  | 560,00 | 609,55 | 670,51 | 737,56 | N |  |
| K/L | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 160,00 | 169,55 | 186,51 | 205,16 |
| Prov | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 400,00 | 440,00 | 484,00 | 532,40 |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Pendidikan yg distandarisasi (N Lembaga = 10 dan N SDM = 150 orang) |  |  | |  | |  |  |  | 400,00 | 440,00 | 484,00 | 532,40 | N |  |
| Lemb | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,20 |
| SDM | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,20 |
|  |  | 1. Persentase K/L Bidang Pendidikan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (N K/L = 3 dan N Prov = 3) |  |  | |  | |  |  |  | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 665,50 | N |  |
| K/L | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 150,00 | 165,00 | 181,50 | 199,65 |
| Prov | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 350,00 | 385,00 | 423,50 | 465,85 |
|  |  | 1. Persentase data terpilah di K/L bidang Pendidikan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (N K/L = 3 dan N Prov = 3) |  |  | |  | |  |  |  | 450,00 | 495,00 | 544,50 | 598,95 | N |  |
| K/L | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 150,00 | 165,00 | 181,50 | 199,65 |
| Prov | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,30 |
|  |  | 1. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Pendidikan Dan Pemda yg ditindaklanjuti (N K/L = 3 dan N Prov = 3) |  |  | |  | |  |  |  | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,30 | N |  |
| K/L | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,10 |
| Prov | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,20 |
| **2799** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Korban Perdagangan Orang** |  | |  | |  | |  |  |  | **3.750,00** | **4.000,00** | **5.650,00** | **7.050,00** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan PPi bidang PKPO yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan | | 3 | | Kebij | | 1 | 1 | 1 | 1.100,00 | 400 | 400 | 400 | N | ARG |
| 1. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang PKPO yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (N: 10 Peraturan) 🡪 yg diukur peraturan atau K/L | | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 1.373,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | N | ARG |
|  |  | 1. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang PKPO | | - | | Model | | - | 1 | 1 | - | - | 500 | 500 | N | ARG |
|  |  | 1. Persentase K/L dan Pemda bidang PKPO yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP (N: K/L = 2 N:Pemda = 2) |  |  | |  | |  |  |  | - | - | - | 1.200,00 | N |  |
| K/L | - | | % | | - | - | 50 | - | - | - | 600 |
| Prov | - | | % | | - | - | 50 | - | - | - | 600 |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO yg distandarisasi (N: Lembaga = 12 N:SDM = 24 orang) |  |  | |  | |  |  |  | - | - | 1.000,00 | 1.200,00 | N |  |
| Lemb | - | | % | | - | 33,33 | 66,6 | - | - | 500 | 600 |  |  |
| SDM | - | | % | | - | 33,33 | 66,6 | - | - | 500 | 600 |  |  |
|  |  | 1. Persentase data terpilah bidang PKPO di K/L dan Pemda yg dianalisis dan dimanfaatkan (N:K/L = 22 N:Pemda = 4) |  |  | |  | |  |  |  | 527,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | N |  |
| K/L | 22,73 | | % | | 45,45 | 68,18 | 90,91 | 270,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Prov | 25 | | % | | 50 | 75 | 100 | 257,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 1. Persentase Laporan monev pelaksanaan PP bidang PKPO di K/L dan Pemda yg ditindaklanjuti (Nnya?) |  |  | |  | |  |  |  | 750,00 | 950,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | N |  |
| K/L | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 350,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 |
| Prov | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| **2800** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan.** |  | |  | |  | |  |  |  | **3.650,00** | **4.725,00** | **4.800,00** | **5.300,00** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan | | 2 | | Kebij | | 2 |  |  | 850,00 | 950,00 |  |  | N |  |
| 1. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan pekerja perempuan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (N: 10 Peraturan) 🡪 yg diukur peraturan atau K/L | | 20 | | % | | 20 | 20 | 20 | 750,00 | 900,00 | 1000,00 | 1100,00 | N | ARG |
|  |  | 1. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan | | - | | Model | | 1 | 1 | 1 | - | 500,00 | 550,00 | 600,00 | N | ARG |
|  |  | 1. Persentase K/L bidang perlindungan pekerja perempuan Dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan (N:K/L = 10 N: Prov = 10; N:Kab/kota = 30) |  |  | |  | |  |  |  | 900,00 | 1050,00 | 1150,00 | 1300,00 | N |  |
| K/L | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 250,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 |
| Prov  Target Kab/Kota mana? | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 550,00 | 700,00 | 750,00 | 850,00 |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang perlindungan pekerja perempuan yg distandarisasi (N:Lembaga = 5 N:SDM = 75) |  |  | |  | |  |  |  | - | - | 600,00 | 700,00 | N |  |
| Lemb |  | | % | |  | 30 | 35 |  |  | 300,00 | 350,00 |
| SDM |  | | % | |  | 30 | 35 |  |  | 300,00 | 350,00 |
|  |  | 1. Persentase data terpilah di K/L bidang perlindungan pekerja perempuan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (N:K/L = 10 N:Prov = 15; N:Kab/Kota =30) |  |  | |  | |  |  |  | 720,00 | 800,00 | 900,00 | 950,00 | N |  |
| K/L | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 250,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 |
| Prov  Target Kab/Kota mana? | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 470,00 | 550,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | 1. Persentase Laporan monev pelaksanaan Perlindungan Pekerja Perempuan di K/L bidang perlindungan pekerja perempuan Dan Pemda yg ditindaklanjuti (N:K/L = 10 N:Prov = 12; N:Kab/kota =30 |  |  | |  | |  |  |  | 530,00 | 525,00 | 600,00 | 650,00 | N |  |
| K/L | 20 | | % | | 20 | 20 | 20 | 230,00 | 175,00 | 200,00 | 250,00 |
| Prov  Target Kab/Kota mana? | 20 | | % | | 20 | 20 | 20 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 400,00 |
| **2801** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang Reponsif Gender** |  | |  | |  | |  |  |  | **3.693,60** | **4.366,68** | **5.160,18** | **5.116,22** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan | | 1 | | Kebj | | 2 | 2 | 1 | 425,00 | 925,58 | 1.018,14 | 559,98 | N | ARG |
| 1. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (N = 3 Peraturan) 🡪 yg diukur peraturan atau K/L | | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 556,00 | 605,00 | 665,50 | 732,05 | N | ARG |
|  |  | 1. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan | | 2 | | Model | | 2 | 2 | 2 | 520,00 | 526,10 | 956,54 | 1.052,19 | N | ARG |
|  |  | 1. Persentase K/L bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan Dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUGterpilah (N K/L= 3, N Pemda=10 |  |  | |  | |  |  |  | 692,60 | 660,00 | 720,00 | 792,00 | N |  |
| K/L | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 300,00 | 330,00 | 360,00 | 396,00 |
| Prov | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 392,60 | 330,00 | 360,00 | 396,00 |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg distandarisasi PUG (N = 3 Lembaga dan SDM = 125 ) |  |  | |  | |  |  |  | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 | N |  |
| Lemb | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 132,00 |
| SDM | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 132,00 |
|  |  | 1. Persentase K/L Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (N K/L= 3, N Pemda=4) |  |  | |  | |  |  |  | 450,00 | 495,00 | 540,00 | 594,00 | N |  |
| K/L | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
| Prov | 25 | | % | | 50 | 75 | 100 | 250,00 | 275,00 | 300,00 | 330,00 |
|  |  | 1. Persentase data terpilah di K/L bidangPertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(N K/L= 3, N Pemda=10) |  |  | |  | |  |  |  | 450,00 | 495,00 | 540,00 | 594,00 | N |  |
| K/L | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
| Prov | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 250,00 | 275,00 | 300,00 | 330,00 |
|  |  | 1. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidangPertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan Dan Pemda yg ditindaklanjuti. (Nnya?) |  |  | |  | |  |  |  | 400,00 | 440,00 | 480,00 | 528,00 | N |  |
| K/L | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
| Prov | 100 | | % | | 100 | 100 | 100 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 264,00 |
| **2802** | **Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Politik & Pengambilan Keputusan yang responsif gender** |  | |  | |  | |  |  |  | 2.853,00 | 3.164,02 | 3.630,43 | 3.993,47 |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Politik & Pengambilan Keputusan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan | | 2 | | Kebij | | 1 | 1 | 1 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 665,50 | N | ARG |
| 1. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Politik & Pengambilan Keputusan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (N = 5 peraturan) 🡪 yg diukur peraturan atau K/L | | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 160,00 | 165,00 | 181,50 | 199,65 | N | ARG |
|  |  | 1. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Politik & Pengambilan Keputusan | | 1 | | Model | | 1 | 1 | 1 | 382,98 | 330,00 | 363,00 | 399,30 | N | ARG |
|  |  | 1. Persentase K/L bidang Politik & Pengambilan Keputusan Dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (N K/L = 7 dan Prov = 10) |  |  | |  | |  |  |  | 470,00 | 495,00 | 544,50 | 598,95 | N |  |
| K/L | 14,29 | | % | | 42,86 | 71,43 | 81,71 | 160,00 | 165,00 | 181,50 | 199,65 |
| Prov | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 310,00 | 330,00 | 363,00 | 399,30 |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Pendidikan yg distandarisasi (N = 7 Lemb dan SDM= 60) |  |  | |  | |  |  |  | - | 150,00 | 315,00 | 346,50 | N |  |
| Lemb | - | | % | | 14,29 | 42,86 | 81,71 | - | 150,00 | 165,00 | 181,50 |
| SDM | - | | % | | - | 33,33 | 66,66 | - | - | 150,00 | 165,00 |
|  |  | 1. Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang Politik & Pengambilan Keputusan (N K/L = 7 dan N Prov = 3) |  |  | |  | |  |  |  | 525,00 | 577,50 | 635,25 | 698,78 | N |  |
| K/L | 14,29 | | % | | 42,86 | 71,43 | 81,71 | 150,00 | 165,00 | 181,50 | 199,65 |
| Prov | 33,33 | | % | | 33,33 | 66,66 | 66,66 | 375,00 | 412,50 | 453,75 | 499,13 |
|  |  | 1. Persentase data terpilah di K/L bidang Politik & Pengambilan Keputusan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (N K/L = 7 dan N Prov = 3) |  |  | |  | |  |  |  | 525,00 | 577,50 | 635,25 | 698,78 | N |  |
| K/L | 14,29 | | % | | 42,86 | 71,43 | 81,71 | 150,00 | 165,00 | 181,50 | 199,65 |
| Prov | 14,29 | | % | | 42,86 | 71,43 | 81,71 | 375,00 | 412,50 | 453,75 | 499,13 |
|  |  | 1. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Politik & Pengambilan Keputusan Dan Pemda yg ditindaklanjuti (N K/L = 7 dan N Prov = 3) |  |  | |  | |  |  |  | 290,02 | 313,02 | 350,93 | 386,02 | N |  |
| K/L | 14,29 | | % | | 42,86 | 71,43 | 81,71 | 90,02 | 99,02 | 108,93 | 119,82 |
| Prov | 14,29 | | % | | 42,86 | 71,43 | 81,71 | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,20 |
| **2803** | **Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang SDA & Lingkungan**  **yang responsif gender** |  | |  | |  | |  |  |  | **6.000,00** | **6.457,25** | **7.102,97** | **7.813,27** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang SDA & Lingkungan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan | | 3 | | Kebij | | 2 | 2 | 2 | 1.190,00 | 1.269,12 | 1.396,03 | 1.535,63 | N | ARG |
| 1. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang SDA & Lingkungan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (N = 3 peraturan) 🡪 yg diukur peraturan atau K/L | | 33,33 | | % | | 66,66 | 100 | 33,33 | 290,00 | 220,00 | 242,00 | 266,20 | N | MDG's |
|  |  | 1. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang SDA & Lingkungan | | 2 | | Model | | 1 | 1 | 1 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 1.464,10 | N | ARG |
|  |  | 1. Persentase K/L bidang SDA & Lingkungan dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (N K/L = 5 dan N Prov = 10) |  |  | |  | |  |  |  | 1.220,00 | 1.338,13 | 1.471,94 | 1.619,13 | N |  |
| K/L | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 665,50 |
| Prov | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 720,00 | 788,13 | 866,94 | 953,63 |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang SDA & Lingkungan yg distandarisasi (N Lembaga = 30 dan N Orang = 200) |  |  | |  | |  |  |  | 800,00 | 880,00 | 968,00 | 1.064,80 | N |  |
| Lemb | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 400,00 | 440,00 | 484,00 | 532,40 |
| SDM | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 400,00 | 440,00 | 484,00 | 532,40 |
|  |  | 1. Persentase K/L Bidang SDA & Lingkungan dan Pemda yang memiliki sistem data terpilah (N K/L = 5 dan N Prov = 4) |  |  | |  | |  |  |  | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 665,50 | N |  |
| K/L | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 150,00 | 165,00 | 181,50 | 199,65 |
| Prov | 25 | | % | | 25 | 75 | 100 | 350,00 | 385,00 | 423,50 | 465,85 |
|  |  | 1. Persentase data terpilah di K/L bidang SDA & Lingkungan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(N K/L = 5 dan N Prov = 4) |  |  | |  | |  |  |  | 400,00 | 440,00 | 484,00 | 532,40 | N |  |
| K/L | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,20 |
| Prov | 25 | | % | | 25 | 75 | 100 | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,20 |
|  |  | 1. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang SDA & Lingkungan Dan Pemda yg ditindaklanjuti(N K/L = 5 dan N Prov = 4) |  |  | |  | |  |  |  | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 665,50 | N |  |
| K/L | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,10 |
| Prov | 25 | | % | | 25 | 75 | 100 | 400,00 | 440,00 | 484,00 | 532,40 |
| **5049** | **Penguatan Kelembagaan PUG di provins** |  | |  | |  | |  |  |  | **10.000,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **25.000,00** |  |  |
| Jumlah prop yang difasilitasi dalam peningkatan pengarusutamaan gender | | 28 | | Prop | | 33 | 33 | 33 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | K/L |  |
| **047.01.07** | **Perlindungan Anak** | 1. **Jumlah Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diterapkan** | |  | |  | |  |  |  | **57.885,80** | **73.117,08**  **(inkonsisten dg hal 9)** | **70.790,75**  **(inkonsisten dg hal 9)** | **73.651,60**  **(inkonsisten dg hal 9)** |  |  |
| 1. **Jumlah KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak** | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | 1. **Kabupaten/Kota Layak Anak** | |  | |  | |  |  |  |
| **2804** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum** |  | |  | |  | |  |  |  | **4.730,00** | **5.686,50** | **5.686,50** | **5.686,50** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan Penanganan ABH yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan | | 3 | | kebij | | 2 | 1 | 1 | 1.940,00 | 930,00 | 515,00 | 526,50 | K/L |  |
| 1. Persentase kebijakan Penanganan ABH yang terkoordinasi antar KL dan Pemda ( N = 15 K/L dan 15 Prov) 🡪 yg diukur kebijakannya atau K/L nya? *Butuh konfirmasi karena pada Deputi Gender ada target yang berupa kebijakan, bukan KL* | K/L | 20 | | % | | 46,67 | 66,67 | 86,67 | 1.910,00 | 2.476,50 | 2.290,00 | 1.860,00 | K/L |  |
| Prov | 20 | | % | | 46,67 | 66,67 | 86,67 |
|  |  | 1. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH | | - | | Model | | 2 | 2 | 2 | - | 650,00 | 650,00 | 650,00 | K/L |  |
|  |  | 1. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH |  |  | |  | |  |  |  | - | - | 720,00 | 1.030,00 | K/L |  |
| KL | - | | K/L | | - | 2 | 2 | - | - | 720,00 | 1.030,00 |
| Prov |  | | Prov | |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 1. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH |  |  | |  | |  |  |  | - | - | - | - | K/L |  |
| K/L | - | | % | | - | - | - | - | - | - | - |
| Prov | - | | % | | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Penanganan ABH yang distandarisasi (N= 2 Lembaga dan 15 SDM) |  |  | |  | |  |  |  |  | 350 | 350 | 350 | K/L |  |
| Lemb | - | | % | | 35 | 59 | 76 | - | 350 | 350 | 350 |
| SDM | - | | % | | 35 | 59 | 76 |  |
|  |  | 1. Jumlah survei bidang Penanganan ABH | | 1 | | Lap | | 1 | 1 | 1 | 240,00 | 310,00 | 280,00 | 300,00 | K/L |  |
|  |  | 1. Persentase sub sistem data bidang Penanganan ABH (N = 5 K/L dan 15 Prov) 🡪 yang diukur K/L nya atau subsistemnya? | | 20 | | % | | 40 | 60 | 80 | 340,00 | 470,00 | 470,00 | 420,00 | K/L |  |
| 20 | | % | | 46,67 | 66,67 | 86,67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan ABH yang diselesaikan tepat waktu | | 1 | | Lap | | 1 | 1 | 1 | 300,00 | 500,00 | 411,50 | 550,00 | K/L |  |
| **2805** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus** |  | |  | |  | |  |  |  | **2.55,00** | **3.300,00** | **3.800,00** | **3.800,00** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan | | 1 | | kebij | | 1 | 1 | 1 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | K/L |  |
| 1. Persentase kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda (N = 8 K/L dan 14 Prov) 🡪 yg diukur kebijakannya atau K/L nya? | K/L | 12,5 | | % | | 37,5 | 62,5 | 87,5 | 525,00 | 400,00 | 550,00 | 550,00 | K/L |  |
| Prov | 21,43 | | % | | 35,71 | 64,29 | 78,57 |
| 1. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus | | - | | Model | | 2 | - | - | - | 500,00 | - | - | K/L |  |
|  |  | 1. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus | | 2 | | K/L | | 2 | 4 | 4 | 625,00 | 750,00 | 900,00 | 900,00 | K/L |  |
| 4 | | Prov | | 6 | 8 | 8 |
|  |  | 1. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus | K/L | - | | % | | - | - | - | - | - | - | - | K/L |  |
| Prov | - | | % | | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Anak Berkebutuhan KHusus yang distandarisasi (N = 2 Lembaga dan 15 SDM) | Lemb | 50 | | % | | 50 | 100 | 100 | 450,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | K/L |  |
| SDM | 26,67 | | % | | 46,67 | 66,67 | 86,67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Jumlah survei bidang penanganan Anak Berkebutuhan Khusus | | 1 | | Lap | | 1 | 1 | 1 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | K/L |  |
|  |  | 1. Persentase sub sistem data bidang Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus ( N= 8 K/L dan 14 Prov) 🡪yg diukur subsistemnya atau K/L nya? | | 0 | | % | | 25 | 62,5 | 87,5 |  | 400,00 | 600,00 | 600,00 | K/L |  |
| 0 | | % | | 28,57 | 57,14 | 85,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yang diselesaikan tepat waktu | | 1 | | Lap | | 1 | 1 | 1 | 250,00 | 250,00 | 350,00 | 350,00 | K/L |  |
| **2806** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan pemenuhan hak sipil anak** |  | |  | |  | |  |  |  | **4.350,00** | **5.310,00** | **5.810,00** | **5.810,00** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan | | 5 | | Kebij | | 1 | 1 | 1 | 1.435,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | K/L |  |
| 1. Persentase kebijakan PHSA yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (N= 9 K/L dan 10 Prov) | | 22,22 | | % | | 44,44 | 66,67 | 88,89 | 1.750,00 | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 | K/L | ARG |
| 30 | | % | | 50 | 70 | 80 |  |  |
| 1. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak | | - | | Model | | 3 | 0 | 0 | - | 1.000,00 | - | - | K/L |  |
|  |  | 1. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak | |  | |  | |  |  |  | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | K/L |  |
| - | | K/L | | 3 | 3 | 3 | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |
|  | | Prov | | 10 | 10 | 10 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak Sipil anak |  |  | |  | |  |  |  | - | - | - | - | K/L |  |
| K/L |  | | % | | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Prov |  | | % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan pemenuhan hak Sipil anak yang distandarisasi(N nya berapa?) |  |  | |  | |  |  |  | - | 200,00 | 100,00 | 100,00 | K/L |  |
| Lemb | 0 | | % | | 30 | 57 | 78 | - | 200,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| SDM |  | | % | | 30 | 57 | 78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Jumlah survai bidang pemenuhan hak Sipil anak | | 2 | | Lap | | 2 | 2 | 2 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | K/L |  |
|  |  | 1. Persentase sub sistem data bidang pemenuhan hak Sipil anak(**N nya apa** sebagai dasar penghitungan presentase? Target dasarnya berapa? ) | | 24 | | % | | 47 | 65 | 82% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | K/L |  |
|  |  | 1. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Hak Sipil Anak yang diselesaikan tepat waktu | | 1 | | Lap | | 3 | 2 | 3 | 565,00 | 1.200,00 | 900,00 | 900,00 | K/L |  |
| **2807** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak** |  | |  | |  | |  |  |  | **4.300,00** | **5.250,00** | **5.350,00** | **5.350,00** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan | | 5 | | Kebij | | 2 | 2 | - | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | - | N |  |
| 1. Persentase kebijakanPenghapusan Kekerasan pada Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (N=8 K/L; 16 Prov) 🡪 yg diukur kebijakannya atau K/L nya? | K/L | 25 | | % | | 50 | 75 | 100 | 1.514,00 | 1.650,00 | 1.700,00 | 1.950,00 | N |  |
| Prov | 13 | | % | | 38 | 63 | 88 |
|  |  | 1. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak | | 1 | | Model | | 5 | 2 | 0 | 250,00 | 1.100,00 | 600,00 | - | N |  |
|  |  | 1. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak | | 1 | | K/L | | 5 | 5 | 5 | 150,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | N |  |
| 1 | | Prov | | 12 | 14 | 14 |
|  |  | 1. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak |  |  | |  | |  |  |  | - | - | - | - | N |  |
| K/L | - | | % | | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Prov | - | | % | | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang distandarisasi (N=33 SDM) |  |  | |  | |  |  |  | 350,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | N |  |
| Lemb | - | | % | | - | - | - | - | - | - | - |  |
| SDM | 24 | | % | | 48% | 73% | 100% | 350,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 |  |
|  |  | 1. Jumlah survei bidang Penghapusan Kekerasan pada Anak | | 3 | | Lap | | 5 | 5 | 5 | 250,00 | 200,00 | 300,00 | 450,00 | N |  |
|  |  | 1. Persentase sub sistem data bidang Penghapusan Kekerasan pada Anak (N=8 K/L; 16 Prov 🡪 yg diukur subsistemnya atau K/L nya? | | 21 | | % | | 50 | 79 | 100 | 300,00 | 250,00 | 300,00 | 500,00 | N |  |
|  |  | 1. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penghapusan Kekerasan pada Anak yang diselesaikan tepat waktu | | 2 | | Lap | | 4 | 2 | 4 | 386,00 | 350,00 | 450,00 | 650,00 | N |  |
| **2808** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak** |  | |  | |  | |  |  |  | **2.601,76** | **5.307,63** | **4.433,26** | **4.752,85** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan | | 15 | | Kebijakan | | 17 | 27 | 27 | 350,00 | 420,00 | 985,00 | 1.000,00 | N |  |
| 1. Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (7 K/L, 34 Prov, 28 Kab/Kota) 🡪 yg diukur kebijakannya atau K/L nya? | | 14,29 | | % | | 42,86 | 57,14 | 71,43 | 991,50 | 1.657,63 | 908,26 | 862,85 | N |  |
| 11,76 | | % | | 41,18 | 50 | 64,71 |  |
| 10,71 | | % | | 39,29 | 50 | 64,29 |  |
|  |  | 1. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (5 Model) | | 2 | | Model | | 3 |  |  | 500,00 | 750,00 | - | - | N |  |
|  |  | 1. Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (28 Kab/Kota) | | 0 0 4 | | KL Prov Kab/Kota | | 0 0 6 | 0 0 6 | 0 0 6 | 200,00 | 1.140,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | N |  |
|  |  | 1. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (14 Kab/Kota) | | **7,14** | | **%** | | **28,57** | **50** | **78,57** | **30,00** | **40,00** | **50,00** | **50,00** | N |  |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang distandarisasi (30 Lembaga; 300 SDM) | Lemb | - | | % | | 30 | 50 | 80 | - | 300,00 | 250,00 | 300,00 | N |  |
| SDM | 10 | | % | | 30 | 50 | 80 | 150,00 | 250,00 | 250,00 | 350,00 |  |
|  |  | 1. Jumlah survai anak bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (4 lap) | | 1 | | Lap | | 1 | 1 | 1 | 150,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | N |  |
|  |  | 1. Persentase sub sistem data Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (2 Sub Sistem data) | | 50 | | % | | 50 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | N |  |
|  |  | 1. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang diselesaikan tepat waktu (6 Laporan) | | 1 | | Lap | | 2 | 1 | 2 | 129,50 | 400,00 | 200,00 | 400,00 | N |  |
| **2809** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan dan PNNL** |  | |  | |  | |  |  |  | ***3.025,00*** | ***5.307,63*** | ***4.433,26*** | ***4.752,85*** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan Lingkungan dan PNLL yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan | | 15 | | Kebij | | 20 | 31 | 22 | 660,00 | 630,00 | 1.260,00 | 1.400,00 |  |  |
| 1. Persentase kebijakan Lingkungan dan PNLL yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (13 K/L, 34 prov, 24 Kab/Kota) 🡪 yg diukur kebijakannya atau K/L nya? | | 7,69 | | % | | 38,46 | 61,54 | 84,62 | 1.101,00 | 1.124,51 | 1.172,79 | 1.114,15 |  |  |
| 8,82 | | % | | 41,18 | 64,71 | 85,29 |
| 12,5 | | % | | 41,67 | 66,67 | 83,33 |
|  |  | 1. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan PNLL (5 Model) | | 2 | | Model | | 3 | 0 | 0 | 400,00 | 600,00 | - | - |  |  |
|  |  | 1. Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan PNLL (10 Kab/Kota) | | 0 0 0 | | KL Prov Kab/Kota | | 0 0 10 | 0 0 10 | 0 0 10 | - | 830,00 | 1.200,00 | 2.350,00 |  |  |
|  |  | 1. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan PNLL (6 kab/kota) | | - | | % | | 33,33 | 50 | 66,67 | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Lingkungan dan PNLL yang distandarisasi (30 Lembaga; 300 SDM) | Lemb | 0 | | % | | 26,67 | 50 | 80 | - | 500,00 | 500,00 | 550,00 |  |  |
| SDM | 5 | | % | | 30 | 55 | 85 | 320,00 | 500,00 | 450,00 | 700,00 |  |  |
|  |  | 1. Jumlah survei anak bidang Lingkungan dan PNLL (4 Lap) | | 1 | | Lap | | 1 | 1 | 1 | 350,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |
|  |  | 1. Persentase sub-sistem data Lingkungan dan PNLL (3 sub sistem | | 50 | | % | | 50 | 100 | 100 | 150,00 | 240,00 | 288,00 | 346,00 |  |  |
|  |  | 1. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Lingkungan dan PNLL yang diselesaikan tepat waktu ( 6 Laporan) | | 1 | | Lap | | 2 | 1 | 2 | 44,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 |  |  |
| **2810** | **Penyusunan dan Harmonisasi KebijakanPenanganan Masalah Sosial Anak** |  | |  | |  | |  |  |  | **2.900,00** | **3.750,00** | **4.250,00** | **4.350,00** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan | | 3 | | Kebij | | 4 | 3 | 4 | 620,00 | 695,00 | 425,00 | 950,00 | B |  |
| 1. Persentase kebijakan PMSA yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (N=7 k/l dan 10 Prov) 🡪 yg diukur kebijakannya atau K/L nya? | | 28,57 | | % | | 42,86 | 71,43 | 85,71 | 1.330,00 | 1.295,00 | 1.030,00 | 930,00 | B | ARG |
| 30 | | % | | 50 | 70 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanaganan Masalah Sosial Anak | | - | | Model | | 3 | 3 | 0 | - | 500,00 | 800,00 | - | B |  |
|  |  | 1. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak | |  | |  | |  |  |  | - | - | 800,00 | 1.060,00 | B |  |
| - | | K/L | | - | 4 | 4 | - | - | 800,00 | 1.060,00 |  |  |
| - | | Pemda | | - | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak |  |  | |  | |  |  |  | - | - | - | - | B |  |
| K/l | - | | % | | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Pemda | - | | % | | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan penanganan masalah sosial anak yang distandarisasi (N= 16 lembaga dan 30 SDM) |  |  | |  | |  |  |  | 350,00 | 385,00 | 425,00 | 450,00 | B |  |
| Lemb | 31,25 | | % | | 56,25 | 75 | 87,5 | 350,00 | 385,00 | 425,00 | 450,00 |  |  |
| SDM |  | | % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Jumlah survei bidang Penanganan Masalah Sosial Anak | | 2 | | Lap | | 2 | 2 | 2 | 250,00 | 275,00 | 300,00 | 330,00 | B |  |
|  |  | 1. Persentase sub sistem data bidang penanganan masalah sosial anak (N=2 K/L dan 5 Prov) 🡪 yg diukur subsistemnya atau K/L nya? | | 25 | | % | | 50 | 75 | 100 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | B |  |
|  |  | 1. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial Anak yang diselesaikan tepat waktu | | 1 | | Laporan | | 2 | 1 | 2 | 250,00 | 490,00 | 350,00 | 500,00 | B |  |
| **2811** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Partisipasi Anak** |  | | | | | | | | | ***2.600,00*** | ***5.206,43*** | ***5.035,63*** | ***5.255,63*** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan Partisipasi Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan | | 18 | | | Kebij | 21 | 21 | 15 | 700,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.050,00 | B |  |
| 1. Persentase kebijakan Partisipasi Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (6 K/L, 8 Prov, 40 Kab/kota) 🡪 yg diukur kebijakannya atau K/L nya? | | 16,67 | | | % | 33,33 | 66,67 | 83,33 | 1.209,20 | 1.305,63 | 1.305,63 | 1.305,63 | B |  |
| 12,5 | | | % | 37,5 | 62,5 | 87,5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | | | % | 40 | 60 | 85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak (5 Model) | | 2 | | | Model | 3 | 0 | 0 | 250,00 | 450,00 | - | - | B |  |
|  |  | 1. Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak (40 kab/kota) | | 0 0 0 | | | KL Prov Kab/Kota | 0 0 10 | 0 0 15 | 0 0 15 | - | 830,00 | 1.290,00 | 1.380,00 | B |  |
|  |  | 1. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak (20 Kab/Kota) | | - | | | % | 40 | 70 | 90 | - | 40,00 | 50,00 | 50,00 | B |  |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Partisipasi Anak yang distandarisasi (8 Lembaga, 200 SDM) | Lemb | 12,5 | | | % | 25 | 50 | 75 | 90,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | B |  |
| SDM | 5 | | | % | 30 | 50 | 65 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | 1. Jumlah survei anak bidang Partisipasi Anak (4 lap) | | 1 | | | Lap | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | B |  |
|  |  | 1. Persentase sub sistem data Partisipasi Anak (1 Sub Sistem) | | 50 | | | % | 50 | 100 | 100 | 100,80 | 100,80 | 160,00 | 190,00 | B |  |
|  |  | 1. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Anak yang diselesaikan tepat waktu (6 Laporan) | | 1 | | | Lap | 2 | 1 | 2 | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | B |  |
| **2812** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak** |  | | | | | | | | | **3,050,03** | **5.032,57** | **5.615,37** | **5.273,17** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan | | 11 | Kebijakan | | | 15 | 15 | 10 | 750,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 700,00 | B |  |
| 1. Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (5 K/L, 7 Prov, 28 kab/kota) 🡪 yg diukur kebijakannya atau K/L nya? | | 20 | % | | | 40 | 60 | 80 | 1.634,80 | 1.458,27 | 1.458,27 | 1.458,27 | B |  |
| 14,29 | % | | | 28,57 | 57,14 | 71,43 |
| 14,29 | % | | | 35,71 | 53,57 | 75 |
|  |  | 1. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (5 Model) | | 0 | Model | | | 3 | 2 | 0 | - | 600,00 | 400,00 | - | B |  |
|  |  | 1. Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (28 kab/kota) 🡪 di kolom target hanya tercantum 18 kab/kota saja? Sisanya? | | 0 0 2 | KL Prov Kab/Kota | | | 0 0 4 | 0 0 6 | 0 0 6 | - | 260,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | B |  |
|  |  | 1. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (14 kab/kota) 🡪 dikolom target tidak diisi persentasenya | | - | % | | | - | - | - | - | - | - | - | B |  |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang distandarisasi 60 Lembaga, 200 SDM) | Lemb | 0 | % | | | 25 | 50 | 70 | - | 500,00 | 500,00 | B |  |  |
| SDM | 20 | % | | | 45 | 70 | 90 | 288,00 | 302,40 | 302,40 | B |  |  |
|  |  | 1. Jumlah survei anak bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (4 Lap) | | 1 | Lap | | | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | B |  |
|  |  | 1. Persentase sub-sistem data Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (1 Sub Sistem) | | 50 | % | | | 50 | 100 | 100 | 100,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | B |  |
|  |  | 1. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang diselesaikan tepat waktu (6 Laporan) | | 1 | Lap | | | 2 | 1 | 2 | 177,20 | 354,40 | 177,20 | 354,40 | B |  |
| **2813** | **Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak** |  | | | | | | | | | **5.779,80** | **9.516,67** | **7.951,07** | **8.363,92** |  |  |
| 1. Jumlah kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan | | 11 | Kebijakan | | | 30 | 31 | 31 | 900,00 | 1.495,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | B |  |
| 1. Persentase kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (4 K/L, 20 Prov, 65 Kab/Kota) 🡪 yg diukur kebijakannya atau K/L nya? | | 25 | % | | | 50 | 50 | 75 | 2.035,00 | 2.132,71 | 2.026,07 | 2.026,07 | B |  |
| 15 | % | | | 40 | 60 | 80 |
| 15,38 | % | | | 40 | 60 | 80 |
|  |  | 1. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (5 Model) | | 2 | Model | | | 3 | 0 | 0 | 400,00 | 600,00 | - | - | B |  |
|  |  | 1. Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (100 kab/kota) | | 0 0 5 | KL Prov Kab/Kota | | | 0 0 25 | 0 0 25 | 0 0 25 | 350,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | B |  |
|  |  | 1. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (50 kab/kota) | | - | % | | | - | - | - | - | - | - | - | B |  |
|  |  | 1. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang distandarisasi (100 Kab/Kota); 400 SDM | Lemb | 10 | % | | | 40 | 70 | 90 | 600,00 | 720,00 | 720,00 | 648,00 | B |  |
| SDM | 10 | % | | | 40 | 70 | 90 | 294,80 | 858,96 | 720,00 | 648,00 |  |
|  |  | 1. Jumlah survei anak bidang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (4 lap) | | 1 | Lap | | | 1 | 1 | 1 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | B |  |
|  |  | 1. Persentase sub-sistem data Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (1 sub sistem data) | | 50 | % | | | 50 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | B |  |
|  |  | 1. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang diselesaikan tepat waktu (6 Laporan) | | 1 | Lap | | | 2 | 1 | 2 | 800,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.600,00 | B |  |
| **5049** | **Penguatan Kelembagaan PUHA di provinsi** |  | |  |  | | |  |  |  | **10.000,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **25.000,00** |  |  |
| Jumlah prop yang difasilitasi dalam peningkatan pengarusutamaan anak | | 28 | Prop | | | 33 | 33 | 33 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | K/L |  |
| **2787** | **Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI)** |  | |  |  | | |  |  |  | **12.000,00** | **11.680,00** | **13.270,00** | **15.250,00** |  |  |
| 1. Jumlah Provinsi sebagai target Pengawasan dan monev penyelenggaraan PA | | 9 | Prov | | | 15 | 20 | 26 | 4.400,00 | 3.600,00 | 4.300,00 | 5.000,00 | B |  |
| 1. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kepada stakeholder terkait PA | | 9 | Keg | | | 15 | 20 | 26 | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | B |  |
| 1. Jumlah Laporan data dan informasi serta saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden | | 2 | Lap | | | 2 | 2 | 2 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | B |  |
|  |  | 1. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti (N berapa?) | | 10 | % | | | 22 | 37 | 55 | 500,00 | 600,00 | 720,00 | 900,00 | B |  |
|  |  | 1. Jumlah Laporan Akuntabilitas dan kinerja organisasi KPAI | | 1 | Lap | | | 1 | 1 | 1 | 400,00 | 480,00 | 500,00 | 650,00 | K/L |  |
|  |  | 1. Jumlah bulan layanan perkantoran | | 100 | % | | | 100 | 100 | 100 | 3.600,00 | 4.000,00 | 4.250,00 | 4.500,00 | K/L |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**TOTAL ALOKASIKEGIATAN PRIORITAS 2015: Rp.216.826,0 juta, terdiri dari :**

1. **Prioritas Nasional Rp. 58.583,7 Juta**
2. **Prioritas Bidang Rp. 34.573,5 Juta**
3. **Prioritas K/L Rp. 123.668,8Juta**

**Jakarta, April 2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kepala Biro Perencanaan  ( Ir. Agustina Erni Susiyanti, M. Sc. )  NIP. 19620824 198702 2 001 | Kementerian Keuangan  Direktur Anggaran II  ( Purwanto, SE, MSc. )  NIP. 19690421 199501 1 001  **Mengetahui,** | Kementerian PPN/Bappenas  Plt. Direktur Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (DR. Hadiat, MA)  NIP. 19601101 198811 1 001 |

|  |  |
| --- | --- |
| Kementerian PPN/Bappenas  Deputi Bidang Sumber Daya Manusia  dan Kebudayaan  ( Dra. Nina Sardjunani, MA )  NIP. 19570925 198511 2001 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak  Sekretaris Menteri  (Dra. Sri Danti, MA)  NIP. 19591115 198803 2001 |